

Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan
dan Tata Lingkungan
Nomor : P.1/PKTL/SETDIT/KEU.0/1/2018

PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN TAHUN 2018

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Gd. Mangala Wanabhakti Blok I, Lt. 7 Jl. Jenderal Gatot Subroto
J A K A R T A



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN**

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN

NOMOR : P.1/PKTL/SETDIT/KEU.0/1/2018

TENTANG

PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN TAHUN 2018

DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong keberhasilan capaian kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015 – 2019 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 serta DIPA RKA-K/L Tahun Anggaran 2018, maka seluruh pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan wajib membuat perjanjian kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2018 yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
- Mengingat :
1. Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, yang merupakan wujud nyata dalam memerangi korupsi secara represif dan preventif;
 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.6/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi Balai Pemantapan Kawasan Hutan;
 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/MenLHK-II/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019;

6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.173/Menlhk-II/2015 Tentang Penunjukan Unit Induk Organisasi Unit Pelaksana Teknis Balai Pemantapan Kawasan Hutan;
7. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.9/PKTL-SET/2015 tentang Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015 – 2019;
8. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.7/PKTL/SETDIT/KEU.0/11/2017 tentang Rencana Kerja (Renja) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2018;
9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN Tahun 2018 Satker lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN TENTANG PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN TAHUN 2018.**

Pasal 1

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai sebagai dasar penilaian dan evaluasi kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sesuai dengan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, sebagaimana tercantum dalam lampiran I, yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 2

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sebagaimana dimaksud Pasal 1 menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sekaligus merupakan pertanggungjawaban kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Tahun 2018.

Pasal 3

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan agar ditindaklanjuti dengan penyusunan perjanjian kinerja secara berjenjang :

- a. Perjanjian Kinerja Eselon II dengan Eselon III dibawahnya dan Eselon III dengan Eselon IV dibawahnya;
- b. Perjanjian Kinerja Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dengan Eselon IV dibawahnya.

Pasal 4 ...

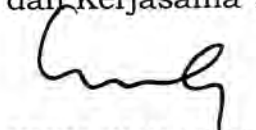
Pasal 4

- (1) Memerintahkan Eselon II dan Eselon III serta Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan untuk menyusun Perjanjian Kinerja sebagaimana Pasal 3 dan melaporkannya kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sebagai Penanggung Jawab Program.
- (2) Format pernyataan dan matriks Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana lampiran II.

Pasal 5

Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
dan Kerjasama Teknik,



ENDI SUGANDI
NIP. 19651123 199803 1 005

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2018
DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI
KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN,

ttd.

SIGIT HARDWINARTO
NIP. 19610202 198603 1 003

Lampiran I.

Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan
dan Tata Lingkungan

Nomor : P.1/PKTL/SETDIT/KEU.0/1/2018

Tanggal : 25 Januari 2018



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Yuyu Rahayu, M.Sc.
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan
Tata Lingkungan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2018

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,

Ir. Yuyu Rahayu, M.Sc.
NIP. 19581030 198203 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
SEKRETARIAT DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : SAKIP Dengan Nilai Minimal 78,00 (A) di Tahun 2019.	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal : SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019 : Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) A (78 point); target tahun 2018 sebesar 77 point : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perencanaan Program dan Anggaran, Data dan Informasi, Evaluasi dan Pelaporan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan ▪ Penyusunan Dokumen Prosedur Kerja, Administrasi Kepegawaian, Administrasi Jabfung dan Peningkatan Kualitas SDM Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan ▪ Penyusunan/Pembahasan Rancangan Peraturan Perundangan, Penanganan Permasalahan Hukum dan Pengembangan Kerjasama Teknik Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan ▪ Penyusunan Laporan SIMAK-BMN, Laporan Keuangan dan BMN, Persuratan dan Pelayanan Umum 	77 Point
			3 Kegiatan
			3 Kegiatan
			3 Kegiatan
			4 Kegiatan
		Layanan Internal (overhead)	1 Layanan
		Layanan Perkantoran	1 Layanan

Kegiatan

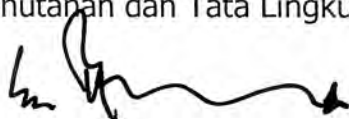
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Anggaran

Rp. 63.990.316.000,- (*enam puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh juta tiga ratus enam belas ribu rupiah*).

Jakarta, Januari 2018

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Sekretaris Direktorat Jenderal
Planologi Kehutanan dan
Tata Lingkungan,



Ir. Yuyu Rahayu, M.Sc.
NIP. 19581030 198203 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Kustanta Budi Prihatno, M.Eng.
Jabatan : Direktur Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah
Pengelolaan Hutan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2018

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,

Ir. Kustanta Budi Prihatno, M.Eng.
NIP. 19600411 198703 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DIREKTORAT RENCANA, PENGGUNAAN DAN PEMBENTUKAN WILAYAH
PENGELOLAAN HUTAN

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlayannya permohonan penggunaan kawasan hutan khususnya dalam rangka ketahanan energi	Persentase permohonan penggunaan kawasan hutan yang memenuhi syarat dan ketentuan diproses penerbitan izinnya sesuai peraturan yang berlaku	100 %
2.	Tersedianya Peta Penetapan dan Kelembagaan KPH	Jumlah KPH yang memiliki peta penetapan dan kelembagaan KPH	92 KPH
		Forest Investment Program Promoting Sustainable Community Based Natural Resource Management and Institutional Development Project	1 Laporan
3.	Pembentukan Unit KPH serta penataan ruang wilayah 34 provinsi	Jumlah Provinsi yang memiliki peta arahan pemanfaatan hutan yang terupdate setiap tahun	34 Provinsi
		Jumlah KPH terintegrasi dalam rencana tata ruang wilayah	34 Provinsi
		Jumlah KPH terintegrasi dalam RKTN, RKTP dan RKTK	34 Provinsi
4.	Tersedianya Data dan Informasi Spasial dan dokumentasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Data dan informasi Spasial dan Dokumentasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	3 Dokumen
5.	Tersedianya Data Areal Perhutanan Sosial Jawa	Data Areal Perhutanan Sosial Jawa	4 Provinsi
6.	Dukungan Manajemen Kegiatan Rencana Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : SAKIP Dengan Nilai 78 (A) di Tahun 2019	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Kawasan Hutan dan sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Layanan Perkantoran 	1 Layanan

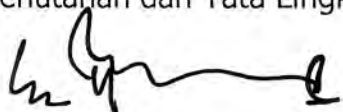
Kegiatan

Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan

Anggaran

Rp. 45.089.110.000,- (*empat puluh lima milyar delapan puluh juta seratus sepuluh ribu rupiah*).

Direktur Jenderal Planologi
 Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
 NIP. 19610202 198603 1 003

Jakarta, Januari 2018

Direktur Rencana, Penggunaan dan
 Pembentukan Wilayah Pengelolaan
 Hutan,



Ir. Kustanta Budi Prihatno, M.Eng.
 NIP. 19600411 198703 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Ir. Ruandha Agung S., M.Sc.
Jabatan : Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2018

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,

Dr. Ir. Ruandha Agung S., M.Sc.
NIP. 19620301 198802 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN

No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Tersedia dan termutakhirkannya data dan informasi SDH Nasional dan KPH	Data dan Peta SDH Nasional mendukung pengalokasian KH	34 Provinsi
		Jumlah KPH yang telah memiliki data dan informasi potensi sumberdaya hutan	100 KPH
		Informasi geospasial tematik lingkungan hidup dan kehutanan mendukung kebijakan satu peta (One Map Policy)	34 Provinsi
2.	Terlaksananya penafsiran citra resolusi tinggi untuk pencapaian target tanah obyek reforma agraria (TORA)	Data penafsiran citra resolusi tinggi untuk pencapaian target tanah obyek reforma agraria (TORA)	33 Provinsi
3.	Dukungan Manajemen Kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : SAKIP Dengan Nilai 78 (A) di Tahun 2019	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Layanan Perkantoran 	1 Layanan

Kegiatan

Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

Anggaran

Rp. 9.608.605.000,- (*sembilan milyar enam ratus delapan juta enam ratus lima ribu rupiah*).

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Jakarta, Januari 2018

Direktur Inventarisasi dan
Pemantauan Sumber Daya Hutan,



Dr. Ir. Ruandha Agung S., M.Sc.
NIP. 19620301 198802 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Muhammad Said, MM
Jabatan : Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2018

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,

Ir. Muhammad Said, M.M.
NIP. 19630318 198905 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DIREKTORAT PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN

No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Terselesaikannya penetapan kawasan hutan sebesar minimal 80% seluruh kawasan hutan	Kawasan hutan yang telah selesai ditetapkan	5 % (tambahan penetapan kawasan hutan di tahun 2018)
2.	Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	1.630.421 Hektar (deviasi 11%)
3.	Termutakhirkannya data dan peta TORA	Data dan peta TORA yang mutakhir	26 Provinsi
4.	Terevaluasinya penyediaan 20% sebagai objek TORA dari kawasan hutan yang dilepaskan untuk perkebunan	Kawasan hutan yang dilepaskan khususnya untuk perkebunan yang telah dievaluasi	13 Provinsi
5.	Terselesaikannya Seluruh Proses Permohonan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan	Draft SK Menteri Tentang Perubahan Fungsi dan Peruntukan Bagi Permohonan Yang Memenuhi Syarat dan Ketentuan Yang Berlaku	100 %
6.	Dukungan Manajemen Kegiatan Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : SAKIP Dengan Nilai 78 (A) di Tahun 2019	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : ▪ Layanan Perkantoran	1 Layanan

Kegiatan

Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Anggaran

Rp. 66.996.108.000,- (*enam puluh enam milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus delapan ribu rupiah*).

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Jakarta, Januari 2018

Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan
Kawasan Hutan,



Ir. Muhammad Said, MM
NIP. 19630318 198905 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Ary Sudijanto, MSE.
Jabatan : Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2018

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,

Ir. Ary Sudijanto, MSE.
NIP. 19681011 199403 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN

No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Terselenggaranya sistem kajian dampak lingkungan yang efektif bagi usaha dan kegiatan dalam rangka pencegahan dampak lingkungan	Persentase permohonan penilaian dokumen lingkungan yang terlayani sesuai dengan NSPK dan standar pelayanan publik	100 %
		Sistem pengambilan keputusan kajian dampak lingkungan yang efektif untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang berkualitas (100 Persen)	100 %
		Jumlah KPA berlisensi dan pemeriksa UKL UPL daerah yang melakukan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan sesuai dengan NSPK 250 daerah	50 Lembaga/ Instansi
2.	Dukungan Manajemen Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : SAKIP Dengan Nilai 78 (A) di Tahun 2019	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Layanan Perkantoran 	1 Layanan

Kegiatan

Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan

Anggaran

Rp. 3.905.953.000,- (*Tiga milyar sembilan ratus lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah*).

Jakarta, Januari 2018

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Direktur Pencegahan Dampak
Lingkungan Usaha dan Kegiatan,



Ir. Ary Sudijanto, MSE.
NIP. 19681011 199403 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Laksmi Wijayanti, MCP.
Jabatan : Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2018

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,

Ir. Laksmi Wijayanti, MCP.
NIP. 19690205 199503 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN KEBIJAKAN WILAYAH DAN SEKTOR

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya analisis Lingkungan bagi rencana zonasi pesisir	Jumlah KLHS zonasi wilayah pesisir layak dan terjamin kualitasnya berbasis daya dukung dan daya tampung	5 KLHS RZWP3K
2.	Terlaksananya analisis lingkungan bagi semua RTRW, RPJP, RPJMN dan KRP Prioritas	Jumlah KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis Daya Dukung Daya Tampung	10 KLHS
		Jumlah KLHS yang tereview kelayakannya	10 KLHS
3.	Tersusunnya RPPLH Nasional dan Daerah untuk menjadi acuan Rencana Pembangunan Daerah (Tertatanya pelestarian dan pemanfaatan SDA dan LH yang berkelanjutan)	Jumlah RPPLH Nasional yang tersusun, ditetapkan dan menjadi acuan pemerintah	1 Dokumen
		Jumlah RPPLH Provinsi yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah	5 Provinsi
		Jumlah RPPLH Kab/Kota yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah	10 Kab/Kota
		Jumlah penetapan indikasi daya dukung nasional dengan pendekatan jasa ekosistem pada setiap ekoregion	1 Indeks
		Jumlah satuan peta ekoregion pada skala 1:250.000	9 Satuan Peta
4.	Tersusunnya Neraca SDA LH dan PDRB Hijau daerah sebagai input Neraca SDA LH dan PDB Hijau Nasional (Tersedia dan terbarukannya data dan informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup)	Jumlah Prov/Kab/Kota yang memiliki neraca SDA LH dan PDRB Hijau	2 Dokumen

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
5.	Dukungan Manajemen Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : SAKIP dengan Nilai Minimal 78 (A) di Tahun 2019	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Layanan Perkantoran 	1 Layanan

Kegiatan

Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor

Anggaran

Rp. 3.808.166.000,- (*tiga milyar delapan ratus delapan juta seratus enam puluh enam rupiah*).

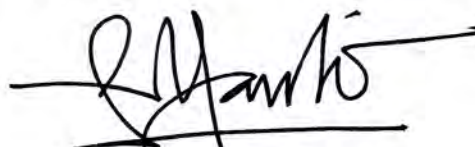
Jakarta, Januari 2018

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Direktur Pencegahan Dampak
Lingkungan Kebijakan Wilayah
dan Sektor,



Ir. Laksmi Wijayanti, MCP.
NIP. 19690205 199503 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahman Panjaitan, S.P., M.Si.
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2018

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,

Rahman Panjaitan, S.P., M.Si.
NIP. 19620526 198602 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH I MEDAN

No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Terselesaikannya rancangan tata hutan dan rancangan rencana pengelolaan KPH	Jumlah KPH yang memiliki rancangan rencana pengelolaan	3 KPH
2.	Tersedianya data dan informasi Sumber Daya Hutan	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi klaster TSP/PSP	7 Klaster
3.	Terlaksananya Penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	Dokumen berita acara tata batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	3.144 Km
4.	Terinventarisasi dan terverifikasinya obyek TORA dalam kawasan hutan	Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan	2 Provinsi
5.	Terlaksananya Dukungan Manajemen Kegiatan Pemantapan Kawasan Hutan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : SAKIP Dengan Nilai Minimal 78.00 (A) di Tahun 2019.	Tata Kelola Pemerintah Yang Baik di Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Layanan perkantoran 	1 Layanan

Kegiatan

Pemantapan Kawasan Hutan

Anggaran

Rp. 72.255.265.000,- (*tujuh puluh dua milyar dua ratus lima puluh lima juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah*).

Jakarta, Januari 2018

Direktur Jenderal Planologi
 Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
 NIP. 19610202 198603 1 003

Kepala Balai Pemantapan Kawasan
 Hutan Wilayah I Medan,



Rahman Panjaitan, S.P., M.Si.
 NIP. 19620526 198602 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Manifas Zubayr, S.Hut., M.Si.
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah II Palembang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2018

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,

Dr. Manifas Zubayr, S.Hut., M.Si.
NIP. 19690805 199803 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH II PALEMBANG

No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Terselesaikannya rancangan tata hutan dan rancangan rencana pengelolaan KPH	Jumlah KPH yang memiliki rancangan rencana pengelolaan	2 KPH
2.	Tersedianya data dan informasi Sumber Daya Hutan	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi klaster TSP/PSP	7 Klaster
3.	Terselenggaranya pengendalian pemantapan kawasan hutan	Dokumen pengendalian pemantapan kawasan hutan	100 %
4.	Terlaksananya Penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	Dokumen berita acara tata batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	4.066 Km
5.	Terinventarisasi dan terverifikasinya obyek TORA dalam kawasan hutan	Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan	1 Provinsi
6.	Terlaksananya Dukungan Manajemen Kegiatan Pemantapan Kawasan Hutan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : SAKIP Dengan Nilai Minimal 78.00 (A) di Tahun 2019.	Tata Kelola Pemerintah Yang Baik di Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : ▪ Layanan perkantoran	1 Layanan

Kegiatan

Pemantapan Kawasan Hutan

Anggaran

Rp. 61.005.094.000,- (*enam puluh satu milyar lima juta sembilan puluh empat ribu rupiah*).

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Jakarta, Januari 2018

Kepala Balai Pemantapan Kawasan
Hutan Wilayah II Palembang,



Dr. Manifas Zubayr, S.Hut., M.Si.
NIP. 19690805 199803 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Yopie, M.P.
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III
Pontianak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2018

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,

Ir. Yopie, M.P.
NIP. 19620620 199403 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH III PONTIANAK

No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Terselesaikannya rancangan tata hutan dan rancangan rencana pengelolaan KPH	Jumlah KPH yang memiliki rancangan rencana pengelolaan	5 KPH
2.	Tersedianya data dan informasi Sumber Daya Hutan	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi klaster TSP/PSP	8 Klaster
3.	Terlaksananya Penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	Dokumen berita acara tata batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	3.444 Km
4.	Terinventarisasi dan terverifikasinya obyek TORA dalam kawasan hutan	Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan	1 Provinsi
5.	Terlaksananya Dukungan Manajemen Kegiatan Pemantapan Kawasan Hutan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : SAKIP Dengan Nilai Minimal 78.00 (A) di Tahun 2019.	Tata Kelola Pemerintah Yang Baik di Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : ▪ Layanan perkantoran	1 Layanan

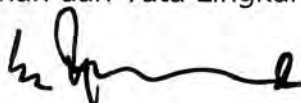
Kegiatan

Pemantapan Kawasan Hutan

Anggaran

Rp. 56.611.135.000,- (*lima puluh enam milyar enam ratus sebelas juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah*).

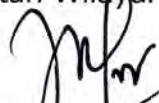
Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Jakarta, Januari 2018

Kepala Balai Pemantapan Kawasan
Hutan Wilayah III Pontianak,



Ir. Yopie, M.P.
NIP. 19620620 199403 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Maryuna Pabutungan, M.P.
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV Samarinda

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2018

Pihak Kedua,

f Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,

Ir. Maryuna Pabutungan, M.P.
NIP. 19670919 199303 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH IV SAMARINDA

No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Terselesaikannya rancangan tata hutan dan rancangan rencana pengelolaan KPH	Jumlah KPH yang memiliki rancangan rencana pengelolaan	5 KPH
2.	Tersedianya data dan informasi Sumber Daya Hutan	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi klaster TSP/PSP	8 Klaster
3.	Terselenggaranya pengendalian pemantapan kawasan hutan	Dokumen pengendalian pemantapan kawasan hutan	100 %
4.	Terlaksananya Penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	Dokumen berita acara tata batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	1.690 Km
5.	Terinventarisasi dan terverifikasinya obyek TORA dalam kawasan hutan	Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan	2 Provinsi
6.	Terlaksananya Dukungan Manajemen Kegiatan Pemantapan Kawasan Hutan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : SAKIP Dengan Nilai Minimal 78.00 (A) di Tahun 2019.	Tata Kelola Pemerintah Yang Baik di Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Layanan perkantoran 	1 Layanan

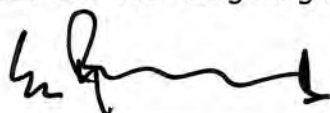
Kegiatan

Pemantapan Kawasan Hutan

Anggaran

Rp. 49.276.973.000,- (*empat puluh sembilan milyar dua ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah*).

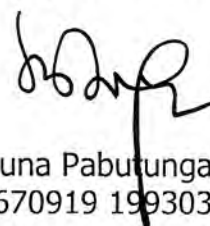
Direktur Jenderal Planologi
 Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
 NIP. 19610202 198603 1 003

Jakarta, Januari 2018

Kepala Balai Pemantapan Kawasan
 Hutan Wilayah IV Samarinda,



Ir. Maryuna Paburungan, M.P.
 NIP. 19670919 199303 2 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Farhanah, M.P.
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah V
Banjarbaru

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2018

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,

Ir. Farhanah, M.P.
NIP. 19610417 198903 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH V BANJARBARU

No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Terselesaikannya rancangan tata hutan dan rancangan rencana pengelolaan KPH	Jumlah KPH yang memiliki rancangan rencana pengelolaan	2 KPH
2.	Tersedianya data dan informasi Sumber Daya Hutan	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi klaster TSP/PSP	4 Klaster
3.	Terselenggaranya pengendalian pemantapan kawasan hutan	Dokumen pengendalian pemantapan kawasan hutan	100 %
4.	Terlaksananya Penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	Dokumen berita acara tata batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	1.484 Km
5.	Terinventarisasi dan terverifikasinya obyek TORA dalam kawasan hutan	Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan	1 Provinsi
6.	Terlaksananya Dukungan Manajemen Kegiatan Pemantapan Kawasan Hutan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : SAKIP Dengan Nilai Minimal 78.00 (A) di Tahun 2019.	Tata Kelola Pemerintah Yang Baik di Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Layanan perkantoran 	1 Layanan

Kegiatan

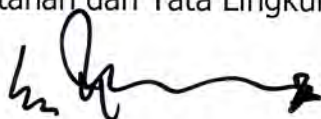
Pemantapan Kawasan Hutan

Anggaran

Rp. 53.517.508.000,- (*lima puluh tiga milyar lima ratus tujuh belas juta lima ratus delapan ribu rupiah*).

Jakarta, Januari 2018

Direktur Jenderal Planologi
 Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
 NIP. 19610202 198603 1 003

Kepala Balai Pemantapan Kawasan
 Hutan Wilayah V Banjarbaru,



Ir. Farhanah, M.P.
 NIP. 19610417 198903 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Zahari H. Sipayung, M.Si.
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VI
Manado

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2018

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,

Ir. Zahari H. Sipayung, M.Si.
NIP. 19600512 198903 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VI MANADO

No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Terselesaikannya rancangan tata hutan dan rancangan rencana pengelolaan KPH	Jumlah KPH yang memiliki rancangan rencana pengelolaan	3 KPH
2.	Tersedianya data dan informasi Sumber Daya Hutan	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi klaster TSP/PSP	7 Klaster
3.	Terlaksananya Penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	Dokumen berita acara tata batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	2.969 Km
4.	Terinventarisasi dan terverifikasinya obyek TORA dalam kawasan hutan	Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan	2 Provinsi
5.	Terlaksananya Dukungan Manajemen Kegiatan Pemantapan Kawasan Hutan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : SAKIP Dengan Nilai Minimal 78.00 (A) di Tahun 2019.	Tata Kelola Pemerintah Yang Baik di Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Layanan perkantoran 	1 Layanan

Kegiatan

Pemantapan Kawasan Hutan

Anggaran

Rp. 51.331.848.000,- (*lima puluh satu milyar tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah*).

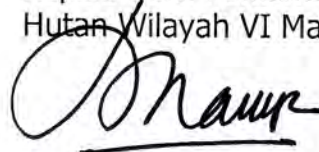
Jakarta, Januari 2018

Direktur Jenderal Planologi
 Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
 NIP. 19610202 198603 1 003

Kepala Balai Pemantapan Kawasan
 Hutan Wilayah VI Manado,



Ir. Zahari H. Sipayung, M.Si.
 NIP. 19600512 198903 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Hasbi Afkar
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII
Makassar

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2018

Pihak Kedua,

✓ Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,

Ir. Hasbi Afkar
NIP. 19610316 198603 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VII MAKASSAR

No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Terselesaikannya rancangan tata hutan dan rancangan rencana pengelolaan KPH	Jumlah KPH yang memiliki rancangan rencana pengelolaan	4 KPH
2.	Tersedianya data dan informasi Sumber Daya Hutan	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi klaster TSP/PSP	7 Klaster
3.	Terselenggaranya pengendalian pemantapan kawasan hutan	Dokumen pengendalian pemantapan kawasan hutan	100 %
4.	Terlaksananya Penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	Dokumen berita acara tata batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	4.326 Km
5.	Terinventarisasi dan terverifikasinya obyek TORA dalam kawasan hutan	Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan	2 Provinsi
6.	Terlaksananya Dukungan Manajemen Kegiatan Pemantapan Kawasan Hutan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : SAKIP Dengan Nilai Minimal 78.00 (A) di Tahun 2019.	Tata Kelola Pemerintah Yang Baik di Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Layanan perkantoran 	1 Layanan

Kegiatan

Pemantapan Kawasan Hutan

Anggaran

Rp. 65.625.913.000,- (*enam puluh lima milyar enam ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah*).

Jakarta, Januari 2018

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Kepala Balai Pemantapan Kawasan
Hutan Wilayah VII Makassar,



Ir. Hasbi Afkar
NIP. 19610316 198603 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Syafri, M.M.
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII
Denpasar

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2018

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,

Ir. Syafri, M.M.
NIP. 19631231 198903 1 014

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VIII DENPASAR

No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Terselesaikannya rancangan tata hutan dan rancangan rencana pengelolaan KPH	Jumlah KPH yang memiliki rancangan rencana pengelolaan	4 KPH
2.	Tersedianya data dan informasi Sumber Daya Hutan	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi klaster TSP/PSP	10 Klaster
3.	Terlaksananya Penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	Dokumen berita acara tata batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	169 Km
4.	Terinventarisasi dan terverifikasinya obyek TORA dalam kawasan hutan	Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan	1 Provinsi
5.	Terlaksananya Dukungan Manajemen Kegiatan Pemantapan Kawasan Hutan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : SAKIP Dengan Nilai Minimal 78.00 (A) di Tahun 2019.	Tata Kelola Pemerintah Yang Baik di Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Layanan perkantoran 	1 Layanan

Kegiatan

Pemantapan Kawasan Hutan

Anggaran

Rp. 16.669.067.000,- (*enam belas milyar enam ratus enam puluh sembilan juta enam puluh tujuh ribu rupiah*).

Jakarta, Januari 2018

Direktur Jenderal Planologi
 Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
 NIP. 19610202 198603 1 003

Kepala Balai Pemantapan Kawasan
 Hutan Wilayah VIII Denpasar,



Ir. Syafri, M.M.
 NIP. 19631231 198903 1 014



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Tarticius Kustanto
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IX Ambon
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2018

Pihak Kedua,

✓-

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,

Drs. Tarticius Kustanto
NIP. 19640712 199203 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH IX AMBON

No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Terselesaikannya rancangan tata hutan dan rancangan rencana pengelolaan KPH	Jumlah KPH yang memiliki rancangan rencana pengelolaan	3 KPH
2.	Tersedianya data dan informasi Sumber Daya Hutan	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi klaster TSP/PSP	6 Klaster
3.	Terlaksananya Penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	Dokumen berita acara tata batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	926 Km
4.	Terinventarisasi dan terverifikasinya obyek TORA dalam kawasan hutan	Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan	1 Provinsi
5.	Terlaksananya Dukungan Manajemen Kegiatan Pemantapan Kawasan Hutan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : SAKIP Dengan Nilai Minimal 78.00 (A) di Tahun 2019.	Tata Kelola Pemerintah Yang Baik di Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Layanan perkantoran 	1 Layanan

Kegiatan

Pemantapan Kawasan Hutan

Anggaran

Rp. 39.154.163.000,- (*tiga puluh sembilan milyar seratus lima puluh empat juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah*).

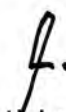
Jakarta, Januari 2018

Direktur Jenderal Planologi
 Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
 NIP. 19610202 198603 1 003

Kepala Balai Pemantapan Kawasan
 Hutan Wilayah IX Ambon,



Drs. Tarticius Kustanto
 NIP. 19640712 199203 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Arnold Manting
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah X
Jayapura

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2018

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,

Ir. Arnold Manting
NIP. 19650430 199203 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH X JAYAPURA

No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Terselesaikannya rancangan tata hutan dan rancangan rencana pengelolaan KPH	Jumlah KPH yang memiliki rancangan rencana pengelolaan	3 KPH
2.	Tersedianya data dan informasi Sumber Daya Hutan	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi klaster TSP/PSP	6 Klaster
3.	Terlaksananya Penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	Dokumen berita acara tata batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	3.220 Km
4.	Terinventarisasi dan terverifikasinya obyek TORA dalam kawasan hutan	Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan	1 Provinsi
5.	Terlaksananya Dukungan Manajemen Kegiatan Pemantapan Kawasan Hutan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : SAKIP Dengan Nilai Minimal 78.00 (A) di Tahun 2019.	Tata Kelola Pemerintah Yang Baik di Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Layanan perkantoran 	1 Layanan

Kegiatan

Pemantapan Kawasan Hutan

Anggaran

Rp. 53.984.109.000,- (*lima puluh tiga milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta seratus sembilan ribu rupiah*).

Direktur Jenderal Planologi
 Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
 NIP. 19610202 198603 1 003

Jakarta, Januari 2018

Kepala Balai Pemantapan Kawasan
 Hutan Wilayah X Jayapura,



Ir. Arnold Manting
 NIP. 19650430 199203 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Heryadi, M.M.
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI
Yogyakarta

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2018

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,

Ir. Heryadi, M.M.
NIP. 19630415 199003 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XI YOGYAKARTA

No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Tersedianya data dan informasi Sumber Daya Hutan	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi klaster TSP/PSP	12 Klaster
2.	Terselenggaranya pengendalian pemantapan kawasan hutan	Dokumen pengendalian pemantapan kawasan hutan	100 %
3.	Terlaksananya Penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	Dokumen berita acara tata batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	1.000 Km
4.	Terlaksananya Dukungan Manajemen Kegiatan Pemantapan Kawasan Hutan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : SAKIP Dengan Nilai Minimal 78.00 (A) di Tahun 2019.	Tata Kelola Pemerintah Yang Baik di Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Layanan perkantoran 	1 Layanan

Kegiatan

Pemantapan Kawasan Hutan

Anggaran

Rp. 14.894.963.000,- (*empat belas milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah*).

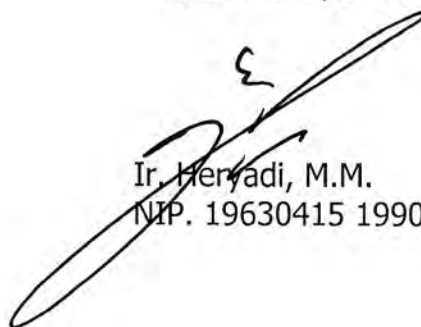
Jakarta, Januari 2018

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Kepala Balai Pemantapan Kawasan
Hutan Wilayah XI Yogyakarta,



Ir. Heriyadi, M.M.
NIP. 19630415 199003 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Tridjoko
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII
Tanjung Pinang.

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2018

Pihak Kedua,

↓ Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,

Ir. Tridjoko
NIP. 19640403 199203 1 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XII TANJUNG PINANG

No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Terselesaikannya rancangan tata hutan dan rancangan rencana pengelolaan KPH	Jumlah KPH yang memiliki rancangan rencana pengelolaan	1 KPH
2.	Tersedianya data dan informasi Sumber Daya Hutan	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi klaster TSP/PSP	10 Klaster
3.	Terselenggaranya pengendalian pemantapan kawasan hutan	Dokumen pengendalian pemantapan kawasan hutan	100 %
4.	Terlaksananya Penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	Dokumen berita acara tata batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	720 Km
5.	Terinventarisasi dan terverifikasinya obyek TORA dalam kawasan hutan	Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan	1 Provinsi
6.	Terlaksananya Dukungan Manajemen Kegiatan Pemantapan Kawasan Hutan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : SAKIP Dengan Nilai Minimal 78.00 (A) di Tahun 2019.	Tata Kelola Pemerintah Yang Baik di Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Layanan perkantoran 	1 Layanan

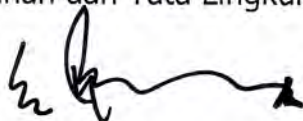
Kegiatan

Pemantapan Kawasan Hutan

Anggaran

Rp. 23.818.708.000,- (*dua puluh tiga milyar delapan ratus delapan belas juta tujuh ratus delapan ribu rupiah*).

Direktur Jenderal Planologi
 Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
 NIP. 19610202 198603 1 003

Jakarta, Januari 2018

Kepala Balai Pemantapan Kawasan
 Hutan Wilayah XII Tanjung Pinang,



Ir. Tridjoko
 NIP. 19640403 199203 1 011



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suhendro A. Basori, S.Hut.
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIII
Pangkal Pinang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2018

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,

Suhendro A. Basori, S.Hut.
NIP. 19690416 199403 1 014

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XIII PANGKAL PINANG

No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Terselesaikannya rancangan tata hutan dan rancangan rencana pengelolaan KPH	Jumlah KPH yang memiliki rancangan rencana pengelolaan	9 KPH
2.	Tersedianya data dan informasi Sumber Daya Hutan	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi klaster TSP/PSP	10 Klaster
3.	Terselenggaranya pengendalian pemantapan kawasan hutan	Dokumen pengendalian pemantapan kawasan hutan	100 %
4.	Terlaksananya Penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	Dokumen berita acara tata batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	600 Km
5.	Terinventarisasi dan terverifikasinya obyek TORA dalam kawasan hutan	Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan	2 Provinsi
6.	Terlaksananya Dukungan Manajemen Kegiatan Pemantapan Kawasan Hutan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : SAKIP Dengan Nilai Minimal 78.00 (A) di Tahun 2019.	Tata Kelola Pemerintah Yang Baik di Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Layanan perkantoran 	1 Layanan

Kegiatan

Pemantapan Kawasan Hutan

Anggaran

Rp. 22.312.693.000,- (*dua puluh dua milyar tiga ratus dua belas juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah*).

Jakarta, Januari 2018

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Kepala Balai Pemantapan Kawasan
Hutan Wilayah XIII Pangkal Pinang,



Suhendra A. Basori, S.Hut.
NIP. 19690416 199403 1 014



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FX. Herwirawan, S.Hut., M.Si.
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIV
Kupang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2018

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,

FX. Herwirawan, S.Hut., M.Si.
NIP. 19700405 199603 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XIV KUPANG

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselesaikannya rancangan tata hutan dan rancangan rencana pengelolaan KPH	Jumlah KPH yang memiliki rancangan rencana pengelolaan	3 KPH
2.	Tersedianya data dan informasi Sumber Daya Hutan	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi klaster TSP/PSP	10 Klaster
3.	Terselenggaranya pengendalian pemantapan kawasan hutan	Dokumen pengendalian pemantapan kawasan hutan	100 %
4.	Terlaksananya Penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	Dokumen berita acara tata batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	400 Km
5.	Terinventarisasi dan terverifikasinya obyek TORA dalam kawasan hutan	Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan	1 Provinsi
6.	Terlaksananya Dukungan Manajemen Kegiatan Pemantapan Kawasan Hutan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : SAKIP Dengan Nilai Minimal 78.00 (A) di Tahun 2019.	Tata Kelola Pemerintah Yang Baik di Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Layanan perkantoran 	1 Layanan

Kegiatan

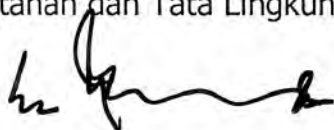
Pemantapan Kawasan Hutan

Anggaran

Rp. 21.380.322.000,- (*dua puluh satu milyar tiga ratus delapan puluh juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah*).

Jakarta, Januari 2018

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Kepala Balai Pemantapan Kawasan
Hutan Wilayah XIV Kupang,



FX. Herwirawan, S.Hut., M.Si.
NIP. 19700405 199603 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andi Setiawan, S.Hut., M.Sc.
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XV
Gorontalo

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2018

Pihak Kedua,

A- Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,

Andi Setiawan, S.Hut., M.Sc.
NIP. 19741024 200003 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XV GORONTALO

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya data dan informasi Sumber Daya Hutan	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi klaster TSP/PSP	6 Klaster
2.	Terlaksananya Penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	Dokumen berita acara tata batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	420 Km
3.	Terinventarisasi dan terverifikasinya obyek TORA dalam kawasan hutan	Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan	1 Provinsi
4.	Terlaksananya Dukungan Manajemen Kegiatan Pemantapan Kawasan Hutan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : SAKIP Dengan Nilai Minimal 78.00 (A) di Tahun 2019.	Tata Kelola Pemerintah Yang Baik di Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Layanan perkantoran 	1 Layanan

Kegiatan

Pemantapan Kawasan Hutan

Anggaran

Rp. 14.193.997.000,- (*empat belas milyar seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*).

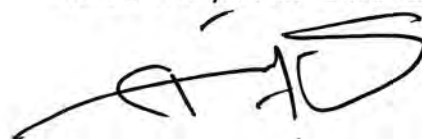
Jakarta, Januari 2018

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Kepala Balai Pemantapan Kawasan
Hutan Wilayah XV Gorontalo,



Andi Setiawan, S.Hut., M.Sc.
NIP. 19741024 200003 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hariani Samal, S.Hut., M.Si.
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVI Palu
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2018

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,

Hariani Samal, S.Hut., M.Si.
NIP. 19731011 199803 2 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XVI PALU

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselesaikannya rancangan tata hutan dan rancangan rencana pengelolaan KPH	Jumlah KPH yang memiliki rancangan rencana pengelolaan	3 KPH
2.	Tersedianya data dan informasi Sumber Daya Hutan	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi klaster TSP/PSP	10 Klaster
3.	Terselenggaranya pengendalian pemantapan kawasan hutan	Dokumen pengendalian pemantapan kawasan hutan	100 %
4.	Terlaksananya Penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	Dokumen berita acara tata batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	1.907 Km
5.	Terinventarisasi dan terverifikasinya obyek TORA dalam kawasan hutan	Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan	1 Provinsi
6.	Terlaksananya Dukungan Manajemen Kegiatan Pemantapan Kawasan Hutan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : SAKIP Dengan Nilai Minimal 78.00 (A) di Tahun 2019.	Tata Kelola Pemerintah Yang Baik di Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Layanan perkantoran 	1 Layanan

Kegiatan

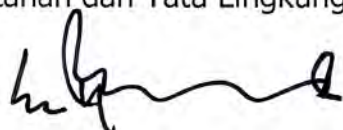
Pemantapan Kawasan Hutan

Anggaran

Rp. 41.992.656.000,- (*empat puluh satu milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah*).

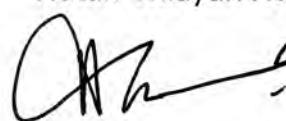
Jakarta, Januari 2018

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Kepala Balai Pemantapan Kawasan
Hutan Wilayah XVI Palu,



Hariani Samal, S.Hut., M.Si.
NIP. 19731011 199803 2 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Willem Kayoi, S.H., M.Si.
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVII
Manokwari

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2018

Pihak Kedua

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,

Willem Kayoi, S.H., M.Si.
NIP. 19620418 199102 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XVII MANOKWARI

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselesaikannya rancangan tata hutan dan rancangan rencana pengelolaan KPH	Jumlah KPH yang memiliki rancangan rencana pengelolaan	3 KPH
2.	Tersedianya data dan informasi Sumber Daya Hutan	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi klaster TSP/PSP	10 Klaster
3.	Terlaksananya Penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	Dokumen berita acara tata batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	2.903 Km
4.	Terinventarisasi dan terverifikasinya obyek TORA dalam kawasan hutan	Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan	1 Provinsi
5.	Terlaksananya Dukungan Manajemen Kegiatan Pemantapan Kawasan Hutan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : SAKIP Dengan Nilai Minimal 78.00 (A) di Tahun 2019.	Tata Kelola Pemerintah Yang Baik di Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Layanan perkantoran 	1 Layanan

Kegiatan

Pemantapan Kawasan Hutan

Anggaran

Rp. 62.795.917.000,- (*enam puluh dua milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah*).

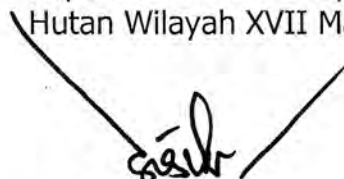
Jakarta, Januari 2018

Direktur Jenderal Planologi
 Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
 NIP. 19610202 198603 1 003

Kepala Balai Pemantapan Kawasan
 Hutan Wilayah XVII Manokwari,



Willem Kayoi, S.H., M.Si.
 NIP. 19620418 199102 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Uly Budiwanto, M.M.
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII
Banda Aceh

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2018

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,

Ir. Uly Budiwanto, M.M.
NIP. 19600808 198903 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XVIII BANDA ACEH

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselesaikannya rancangan tata hutan dan rancangan rencana pengelolaan KPH	Jumlah KPH yang memiliki rancangan rencana pengelolaan	1 KPH
2.	Tersedianya data dan informasi Sumber Daya Hutan	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi klaster TSP/PSP	4 Klaster
3.	Terlaksananya Penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	Dokumen berita acara tata batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	968 Km
4.	Terinventarisasi dan terverifikasinya obyek TORA dalam kawasan hutan	Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan	1 Provinsi
5.	Terlaksananya Dukungan Manajemen Kegiatan Pemantapan Kawasan Hutan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : SAKIP Dengan Nilai Minimal 78.00 (A) di Tahun 2019.	Tata Kelola Pemerintah Yang Baik di Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Layanan perkantoran 	1 Layanan

Kegiatan

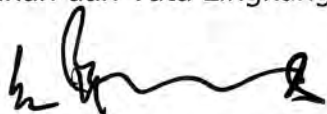
Pemantapan Kawasan Hutan

Anggaran

Rp. 18.261.962.000,- (*delapan belas milyar dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah*).

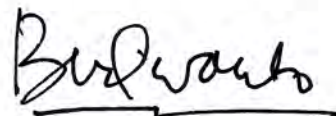
Jakarta, Januari 2018

Direktur Jenderal Planologi
 Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
 NIP. 19610202 198603 1 003

Kepala Balai Pemantapan Kawasan
 Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh,



Ir. Uly Budiwanto, M.M.
 NIP. 19600808 198903 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Sigid Darussalam, M.P.
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX
Pekanbaru

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2018

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,

Ir. Sigid Darussalam, M.P.
NIP. 19610409 198903 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XIX PEKANBARU

No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Terselesaikannya rancangan tata hutan dan rancangan rencana pengelolaan KPH	Jumlah KPH yang memiliki rancangan rencana pengelolaan	3 KPH
2.	Tersedianya data dan informasi Sumber Daya Hutan	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi klaster TSP/PSP	7 Klaster
3.	Terselenggaranya pengendalian pemantapan kawasan hutan	Dokumen pengendalian pemantapan kawasan hutan	100 %
4.	Terlaksananya Penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	Dokumen berita acara tata batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	3.651 Km
5.	Terinventarisasi dan terverifikasinya obyek TORA dalam kawasan hutan	Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan	1 Provinsi
6.	Terlaksananya Dukungan Manajemen Kegiatan Pemantapan Kawasan Hutan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : SAKIP Dengan Nilai Minimal 78.00 (A) di Tahun 2019.	Tata Kelola Pemerintah Yang Baik di Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Layanan perkantoran 	1 Layanan

Kegiatan

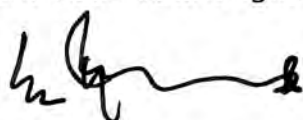
Pemantapan Kawasan Hutan

Anggaran

Rp. 47.663.351.000,- (*empat puluh tujuh milyar enam ratus enam puluh tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah*).

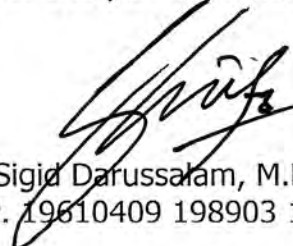
Jakarta, Januari 2018

Direktur Jenderal Planologi
 Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
 NIP. 19610202 198603 1 003

Kepala Balai Pemantapan Kawasan
 Hutan Wilayah XIX Pekanbaru,



Ir. Sigid Darussalam, M.P.
 NIP. 19610409 198903 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Subardja, M.Si.
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XX
Bandar Lampung

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2018

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,

Ir. Subardja, M.Si.
NIP. 19610214 198901 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XX BANDAR LAMPUNG

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselesaikannya rancangan tata hutan dan rancangan rencana pengelolaan KPH	Jumlah KPH yang memiliki rancangan rencana pengelolaan	2 KPH
2.	Tersedianya data dan informasi Sumber Daya Hutan	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi klaster TSP/PSP	10 Klaster
3.	Terselenggaranya pengendalian pemantapan kawasan hutan	Dokumen pengendalian pemantapan kawasan hutan	100 %
4.	Terlaksananya Penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	Dokumen berita acara tata batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	230 Km
5.	Terinventarisasi dan terverifikasinya obyek TORA dalam kawasan hutan	Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan	1 Provinsi
6.	Terlaksananya Dukungan Manajemen Kegiatan Pemantapan Kawasan Hutan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : SAKIP Dengan Nilai Minimal 78.00 (A) di Tahun 2019.	Tata Kelola Pemerintah Yang Baik di Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Layanan perkantoran 	1 Layanan

Kegiatan

Pemantapan Kawasan Hutan

Anggaran

Rp. 14.392.466.000,- (*empat belas milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah*).

Jakarta, Januari 2018

Direktur Jenderal Planologi
 Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
 NIP. 19610202 198603 1 003

Kepala Balai Pemantapan Kawasan
 Hutan Wilayah XX Bandar Lampung,



Ir. Subardja, M.Si
 NIP. 19610214 198901 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Herban Heryandana, S.Hut., M.Sc.
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI
Palangkaraya

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2018

Pihak Kedua,

A
Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,

Herban Heryandana, S.Hut., M.Sc.
NIP. 19730523 199803 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XXI PALANGKARAYA

No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Terselesaikannya rancangan tata hutan dan rancangan rencana pengelolaan KPH	Jumlah KPH yang memiliki rancangan rencana pengelolaan	2 KPH
2.	Tersedianya data dan informasi Sumber Daya Hutan	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi klaster TSP/PSP	10 Klaster
3.	Terselenggaranya pengendalian pemantapan kawasan hutan	Dokumen pengendalian pemantapan kawasan hutan	100 %
4.	Terlaksananya Penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	Dokumen berita acara tata batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	4.554 Km
5.	Terinventarisasi dan terverifikasinya obyek TORA dalam kawasan hutan	Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan	1 Provinsi
6.	Terlaksananya Dukungan Manajemen Kegiatan Pemantapan Kawasan Hutan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : SAKIP Dengan Nilai Minimal 78.00 (A) di Tahun 2019.	Tata Kelola Pemerintah Yang Baik di Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Layanan perkantoran 	1 Layanan

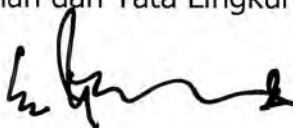
Kegiatan

Pemantapan Kawasan Hutan

Anggaran

Rp. 93.867.485.000,- (*sembilan puluh tiga milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah*).

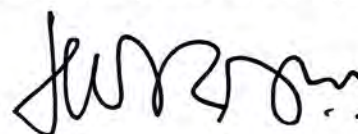
Direktur Jenderal Planologi
 Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
 NIP. 19610202 198603 1 003

Jakarta, Januari 2018

Kepala Balai Pemantapan Kawasan
 Hutan Wilayah XXI Palangkaraya,



Herban Heryandana, S.Hut., M.Sc.
 NIP. 19730523 199803 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Lontas Jonner Sirait
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXII
Kendari

selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2018

Pihak Kedua,

 Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,

Ir. Lontas Jonner Sirait
NIP. 19620416 198901 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XXII KENDARI

No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Terselesaikannya rancangan tata hutan dan rancangan rencana pengelolaan KPH	Jumlah KPH yang memiliki rancangan rencana pengelolaan	4 KPH
2.	Tersedianya data dan informasi Sumber Daya Hutan	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi klaster TSP/PSP	10 Klaster
3.	Terlaksananya Penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	Dokumen berita acara tata batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	1.705 Km
4.	Terinventarisasi dan terverifikasinya obyek TORA dalam kawasan hutan	Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan	1 Provinsi
5.	Terlaksananya Dukungan Manajemen Kegiatan Pemantapan Kawasan Hutan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : SAKIP Dengan Nilai Minimal 78.00 (A) di Tahun 2019.	Tata Kelola Pemerintah Yang Baik di Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Layanan perkantoran 	1 Layanan

Kegiatan

Pemantapan Kawasan Hutan

Anggaran

Rp. 45.158.613.000,- (*empat puluh lima milyar seratus lima puluh delapan juta enam ratus tiga belas ribu rupiah*).

Jakarta, Januari 2018

Direktur Jenderal Planologi
 Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
 NIP. 19610202 198603 1 003

Kepala Balai Pemantapan Kawasan
 Hutan Wilayah XXII Kendari,



Ir. Lontas Jonner Sirait
 NIP. 19620416 198901 1 001

Lampiran II.

Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan
dan Tata Lingkungan

Nomor : P.1/PKTL/SETDIT/KEU.0/1/2018

Tanggal : 25 Januari 2018



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Ka. Bag./Ka. Sub Dit./Ka. Sub Bag./Ka. Seksi
lanjutnya disebut pihak pertama

Nama :
Jabatan : Sek./Dir./Ka. Bag./Ka. Sub Dit./Ka. BPKH
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

....., 2018

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

.....
NIP.

.....
NIP.

